

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pariwisata

Pariwisata adalah segala macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, maupun Pemerintah Daerah (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009). Dalam pariwisata, terdapat komponen-komponen yang harus diperhatikan agar suatu pariwisata dapat mencapai keberlanjutan, komponen-komponen tersebut terdiri dari: (1) daya tarik wisata/*attractions*; (2) fasilitas dan jasa pelayanan wisata/*amenities*; (3) kemudahan untuk mencapai destinasi wisata/*accessibility*; dan (4) layanan pendukung/*ancilliary* (Isdarmanto, 2017).

Daya tarik wisata/*attractions* adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan atas segala sesuatu dianggap unik, indah, dan bernilai, dapat berupa kekayaan alam, budaya maupun hasil manusia (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009). Daya tarik wisata/atraksi merupakan pendorong wisatawan berkunjung ke suatu destinasi tertentu (Bhati & Pearce, 2017), faktor utama yang menentukan wisatawan berkunjung (Masiero & Hrankai, 2022), serta faktor terpenting dalam melahirkan suatu pariwisata. Daya tarik wisata berkorelasi positif dengan penilaian kepuasan wisatawan, dimana daya tarik wisata yang kuat akan mendorong keinginan wisatawan untuk berkunjung (Shaykh-Baygloo, 2021).

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025, jenis-jenis daya tarik wisata meliputi: (1) daya tarik wisata alam, merupakan daya tarik wisata alam dengan potensi keanekaragaman dan keunikan alam pada wilayah perairan laut maupun daratan; (2) daya tarik wisata budaya, merupakan hasil olah cipta dan karsa manusia sebagai makhluk budaya yang dapat dibedakan atas daya tarik yang berwujud (*tangible*) dan tidak berwujud (*intangibile*); (3) daya

tarik buatan manusia, merupakan daya tarik khusus yang merupakan hasil kreasi artifisial kegiatan manusia di luar daya tarik wisata alam dan daya tarik wisata budaya. Ketiga jenis daya tarik wisata tersebut dikategorikan dalam kategori kegiatan wisata diantaranya: wisata petualangan, wisata agro, wisata kreatif, wisata kuliner, wisata budaya, wisata sejarah, wisata pendidikan, wisata desa, wisata kota, dll. Dalam pengembangannya menjadi pariwisata, selain memiliki daya tarik wisata suatu kawasan juga perlu untuk memperhatikan hal-hal seperti kekhususan daya tarik, akses dan fasilitas yang memadai serta memenuhi syarat yaitu: *something to see*, yaitu sesuatu yang menarik untuk dilihat oleh pengunjung; *something to do*, yaitu memiliki sesuatu yang memungkinkan pengunjung untuk melakukan aktivitas wisata, dan *something to buy*, yaitu sesuatu yang dapat dibeli oleh pengunjung (Pujaastawa et al., 2015).

Amenity (amenitas) adalah segala fasilitas pendukung yang bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan wisatawan selama berada di destinasi wisata. Amenitas berkaitan dengan ketersediaan sarana akomodasi untuk menginap serta restoran/warung untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum wisatawan. Fasilitas lain yang diperlukan untuk kebutuhan lainnya seperti toilet umum, *rest area*, tempat parkir, klinik kesehatan, dan sarana ibadah sebaiknya juga tersedia di sebuah destinasi (Isdarmanto, 2017). Daya tarik/atraksi selain menarik wisatawan juga berimplikasi terhadap fasilitas-fasilitas penunjang (Mafliyanti, 2018). Fasilitas dan akomodasi pada destinasi wisata dibutuhkan selama berada pada tempat tersebut. Ketersediaan fasilitas dan akomodasi yang memadai pada destinasi wisata mempengaruhi kepuasan dan lama kunjungan wisatawan (Rahmi, 2017). Menurut Sulistyadi & Derinta Entas (2019) keterbatasan amenitas pada suatu destinasi wisata mempengaruhi minat wisatawan untuk mengunjungi destinasi wisata tersebut.

Accessibility atau aksesibilitas adalah sarana dan infrastruktur untuk menuju destinasi. Aksesibilitas dalam arti kemudahan dalam mencapai destinasi wisata juga dinilai merupakan faktor penting yang mempengaruhi kepuasan wisatawan, kenyataannya banyak sekali kawasan wisata yang memiliki daya tarik alam maupun budaya yang layak untuk dijual kepada wisatawan namun tidak mempunyai

aksesibilitas yang baik (Isdarmanto, 2017). Aksesibilitas mencakup kemudahan sarana dan sistem transportasi (Sulistiyadi & Derinta Entas, 2019). Keputusan wisatawan untuk berkunjung ke destinasi wisata selain berdasarkan daya tariknya ditentukan juga oleh aksesibilitas transportasi. Aksesibilitas berupa transportasi merupakan faktor kunci pengembangan pariwisata yang memungkinkan untuk penciptaan atraksi dan pertumbuhan dari yang telah ada sebelumnya, sehingga dapat dikatakan bahwa aksesibilitas dan layanan transportasi yang berkualitas dapat membantu memperoleh manfaat maksimal dari pariwisata (Hardy et al., 2020).

Ancillary atau pendukung pariwisata merupakan layanan pengaturan terhadap atraksi, aksesibilitas maupun amenitas pada suatu kawasan (Isdarmanto, 2017). Pelayanan tambahan (*ancillary service*) harus disediakan oleh pemerintah daerah dari suatu daerah tujuan wisata, baik untuk wisatawan maupun untuk pelaku pariwisata. Pelayanan yang disediakan termasuk: pemasaran, pembangunan fisik (air minum, listrik, telepon, dan lain-lain) serta mengkoordinir segala macam aktivitas dengan peraturan (Suwena & Widyatmaja, 2017).

2.2 Pariwisata Berkelanjutan

Dewasa ini perkembangan pariwisata dipengaruhi oleh isu pembangunan berkelanjutan, dimana kemudian konsep pembangunan pariwisata mengalami perkembangan kepada pembangunan pariwisata berkelanjutan. Pengembangan pariwisata yang semula berorientasi pada pengembangan produk wisata massal (*mass tourism*) secara perlahan mulai bergeser ke arah pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*). Menurut *Asia-Pacific Economic Cooperation* (2013) pariwisata berkelanjutan dapat didefinisikan sebagai pariwisata yang memperhitungkan sepenuhnya dampak ekonomi, sosial dan lingkungan saat ini dan masa depan, menangani kebutuhan wisatawan, industri, lingkungan serta masyarakat setempat.

Pariwisata berkelanjutan mempedomani dimensi-dimensi dalam pembangunan berkelanjutan yaitu dimensi ekonomi, dimensi sosial dan dimensi lingkungan (Sulistiyadi & Derinta Entas, 2021). Pariwisata berkelanjutan merupakan bagian integral dari pembangunan pembangunan berkelanjutan, muncul

sebagai hasil logis dari pencegahan penggunaan sumber daya dan atraksi pariwisata yang tidak terkendali dan berlebihan (Milićević et al., 2021).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan, ruang lingkup pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan meliputi: pengelolaan berkelanjutan, keberlanjutan sosial dan ekonomi, keberlanjutan budaya dan keberlanjutan lingkungan. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2012) menyatakan bahwa tujuan pariwisata berkelanjutan adalah mengurangi kemiskinan, dengan menghormati keotentikan sosial-budaya, dan penggunaan sumberdaya lingkungan secara bertanggung-jawab, dan tidak hanya mendorong melainkan juga memfasilitasi serta melakukan pemberdayaan terhadap komunitas agar mereka mampu berperan serta dalam proses produksi serta mendapat berbagai manfaat langsung dari kegiatan pariwisata.

Prinsip umum dalam pariwisata berkelanjutan yaitu: (1) menyeimbangkan pemanfaatan lingkungan dengan manfaat ekonomis dari kepariwisataan. (2) menyeimbangkan pemanfaatan sumberdaya lingkungan dengan perubahan nilai sosial dan masyarakat lokal yang disebabkan oleh penggunaan sumberdaya lingkungan, dan (3) menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan dampak pertumbuhan ekonomi pada nilai sosial dan masyarakat lokal. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi prinsip pariwisata berkelanjutan yaitu: (1) pertumbuhan penduduk; (2) perkembangan ekonomi; (3) perkembangan politik dan hukum; (4) perkembangan sosial budaya; (5) perkembangan teknologi; dan (6) globalisasi (Sulistiyadi & Derinta Entas, 2021).

Pengembangan pariwisata berkelanjutan harus selalu berdampak positif bagi masyarakat lokal, pemerintah, dan investor sebagai pemangku kepentingan pariwisata, baik untuk saat ini maupun di masa depan (Made dkk., 2018). Selain itu dalam pelaksanaan pariwisata berkelanjutan membutuhkan hubungan yang terkoordinasi antara ekonomi, sosial budaya dan lingkungan (Zhang, Zhong, & Yu, 2022). Pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dicapai dengan menyeimbangkan ketiga elemen utama tersebut

2.3 Pariwisata dengan Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Berdasarkan SNI 8152:2015 pariwisata alam merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata alam, termasuk pengusaha obyek dan daya tarik serta usaha yang terkait dengan wisata alam. Wisata alam seperti agrowisata maupun wisata bahari termasuk ke dalam ruang lingkup pengelolaan pariwisata alam.

Menurut Mandić (2019) sebagian besar destinasi pariwisata unggulan merupakan pariwisata yang berbasis alam. Pada pariwisata berbasis alam, sumber daya alam merupakan daya tarik utama sehingga perlindungannya merupakan suatu prioritas (Lee et al., 2021). Seiring dengan semakin tingginya intensitas pengembangan pariwisata suatu destinasi, potensi konflik antara menjaga lingkungan alam yang berkelanjutan dan pembangunan ekonomi juga meningkat (Mandić, 2019).

Menurut Eagles et al (2002), pemanfaatan sumber daya alam pada aktivitas pariwisata berpotensi menyebabkan sejumlah dampak negatif pada lingkungan diantaranya: (1) unsur ekosistem: pembangunan akomodasi, pusat pengunjung, infrastruktur dan sarana wisata lainnya memiliki dampak langsung terhadap lingkungan mulai dari penebangan vegetasi, gangguan hewan akibat terganggunya habitat, dan dampak pada drainase; (2) unsur tanah: pemadatan tanah dapat terjadi pada daerah tertentu serta menyebabkan pemindahan tanah dan kemungkinan terjadinya erosi, hal tersebut dapat berlanjut setelah gangguan hilang; (3) vegetasi: wisata yang terkonsentrasi pada sekitar fasilitas memiliki efek negatif pada vegetasi, transportasi dapat menyebabkan hilangnya vegetasi tertentu, transmisi gulma maupun gangguan pada hewan; (4) air: meningkatnya kebutuhan air bersih, pembuangan limbah/sampah di sungai, danau, atau laut, aktivitas air dapat mempengaruhi tanaman dan spesies air tertentu; (5) udara: transportasi bermotor dapat menyebabkan polusi dari emisi yang dihasilkan; (6) margasatwa diantaranya gangguan pengunjung pada serangga dan invetebrata kecil.

Agar dapat mencapai suatu keberlanjutan pariwisata, maka pariwisata yang berbasis alam harus fokus pada pengelolaan lingkungan (Lee & Hsieh, 2016). Saat kegiatan wisata yang berlebihan dilakukan pada suatu kawasan maka dapat

menyebabkan penipisan terhadap sumber daya yang secara negatif akan mempengaruhi daya tarik dan juga produktifitas/profitabilitas kegiatan pedesaan tradisional. Berdasarkan hal tersebut maka sangat penting bagi otoritas pembangunan lokal untuk: (1) melakukan penilaian ambang batas untuk pembangunan di kawasan wisata yang tidak boleh dilampaui untuk mencegah penipisan sumber daya yang merugikan, (2) melakukan perencanaan untuk mencapai tujuan memaksimalkan keuntungan tanpa mengorbankan sumber daya alam (Iannucci et al., 2022).

Menurut Milićević et al (2021) pada umumnya pembangunan fasilitas wisata di destinasi pariwisata berbasis alam seringkali tidak sesuai dengan tujuan konservasi, sehingga mempengaruhi kualitas alam. Pembangunan sarana prasarana yang meluas untuk meningkatkan kapasitas akomodasi memiliki dampak negatif ganda yaitu di satu sisi menurunkan keindahan dan integritas lingkungan dan di sisi lain dapat mengikis nilai lingkungan sumber daya yang pada akhirnya dapat berdampak negatif pada tujuan ekonomi wisata pedesaan. Alam tidak lagi menarik untuk wisata bahkan tidak produktif untuk tujuan pertanian ketika sumber daya lingkungan menurun, kemampuan ekologis menurun dan tidak dapat dipulihkan (Iannucci et al., 2022).

Pada kawasan pariwisata berbasis alam perlu untuk menerapkan tindakan konservasi agar tidak membahayakan kelangsungan hidup yang berkepanjangan dan pengembangan ekonomi masyarakat setempat (Said et al., 2017). Tanpa adanya peraturan dalam pengelolaan wisata risiko untuk menggunakan sumber daya lingkungan akan semakin tinggi (Iannucci et al., 2022). Dalam rangka mencapai tiga mandat pengelolaan pariwisata berbasis alam yaitu pemanfaatan rekreasi, konservasi dan nilai ekonomi, Ly & Nguyen (2017) mengusulkan tiga pendekatan yang berbeda untuk penerapan daya dukung sebagai berikut:

1. Pendekatan *laissez-faire*: pendekatan yang tidak melibatkan regulasi dari otoritas lokal, tidak memiliki peraturan tentang pengelolaan daya dukung, membiarkan wisatawan melakukan apapun dalam kawasan wisata, tidak memberikan pedoman ataupun informasi terkait kegiatan pada kawasan wisata bahkan saat kawasan berada pada puncak kunjungan. Ketika

kepadatan berlebih terjadi, pengelola kawasan wisata akan membuat keputusan berdasarkan kasus per kasus untuk mengatasi masalah tersebut.

2. Pendekatan santai: terdapat kolaborasi antara sektor publik dan swasta dalam pengelolaan kawasan, tidak memiliki peraturan tentang daya dukung dalam kegiatan sehari-hari. Pengelola kawasan hanya akan terlibat dalam kasus tertentu. Namun, terdapat tempat-tempat tertentu dalam kawasan tersebut yang dilindungi secara ketat dan menetapkan adanya batasan jumlah wisatawan yang ditetapkan.
3. Pendekatan ketat: terdapat peraturan resmi yang ditetapkan oleh otoritas setempat tentang pengelolaan daya dukung lingkungan untuk semua obyek wisata dalam kawasan. Menetapkan jumlah maksimum wisatawan yang mengunjungi kawasan berdasarkan total luas situs dibagi dengan rata-rata jumlah kunjungan wisatawan.

2.4 Desa Wisata

Desa wisata adalah wilayah administratif desa yang memiliki potensi dan keunikan daya tarik wisata yang khas yaitu merasakan pengalaman keunikan kehidupan dan tradisi masyarakat di perdesaan dengan segala potensinya (Aryani, et al., 2019). Menurut Sulistyadi & Derinta Entas (2019) tujuan pengembangan suatu desa menjadi desa wisata antara lain: (1) mendukung program pemerintah dalam program kepariwisataan dengan penyediaan program alternatif; (2) menggali potensi desa untuk pembangunan masyarakat desa setempat; dan (3) memperluas lapangan kerja dan lapangan usaha bagi masyarakat setempat.

Menurut Wirdayanti dkk (2021) desa mempunyai potensi sebagai destinasi pariwisata berbasis komunitas yang didasari kearifan lokal budaya masyarakatnya. Desa wisata adalah kawasan yang menawarkan wisatawan untuk merasakan pengalaman dan keunikan kehidupan serta tradisi masyarakat yang khas di perdesaan melalui potensi-potensi daya tarik yang ada. Desa wisata memiliki beberapa kriteria: (1) terdapat daya tarik wisata, dapat berupa daya tarik alam, daya tarik budaya maupun daya tarik buatan; (2) terdapatnya suatu komunitas masyarakat yang terbentuk; (3) memiliki potensi sumber daya manusia lokal yang

terlibat dalam aktivitas pariwisata; (4) mempunyai kelembagaan untuk pengelolaan; terdapatnya peluang dan dukungan terhadap fasilitas dan sarana prasarana dasar untuk mendukung kegiatan wisata; dan (5) memiliki potensi dan kesempatan pengembangan pasar.

Terdapat beberapa prinsip dalam pengembangan produk desa wisata yaitu: (1) keaslian (atraksi merupakan aktivitas asli masyarakat lokal), (2) masyarakat setempat (tradisi keseharian masyarakat lokal), (3) keterlibatan masyarakat; (4) sikap dan nilai (nilai-nilai/norma sehari-hari); serta (5) konservasi dan daya dukung (tidak merusak fisik dan sosial serta sesuai dengan daya dukung). Terdapat 4 (empat) jenis desa wisata yang dapat menjadi acuan, antara lain: (1) desa wisata berbasis keunikan sumber daya alam: desa wisata yang menjadikan kondisi alam sebagai daya tarik utama seperti pegunungan, lembah, pantai, sungai, danau dan berbagai bentuk bentang alam yang unik lainnya, (2) desa wisata berbasis keunikan sumber daya budaya lokal: desa wisata yang menjadikan keunikan adat tradisi dan kehidupan keseharian masyarakat menjadi daya tarik utama seperti aktivitas mata pencaharian, religi maupun bentuk aktifitas lainnya, (3) desa wisata kreatif: desa wisata yang menjadikan keunikan aktivitas ekonomi kreatif dari kegiatan industri rumah tangga masyarakat lokal, baik berupa kerajinan, maupun aktivitas kesenian yang khas menjadi daya tarik utama. dan (4) desa wisata berbasis kombinasi: desa wisata yang mengkombinasikan antara satu atau lebih daya tarik wisata yang dimiliki seperti alam, budaya dan kreatif.

Unsur utama penggerak kegiatan desa wisata adalah masyarakat setempat. Masyarakat setempat memiliki peran penting dalam pengelolaan dan pengembangan desa wisata karena sumber daya dan keunikan tradisi serta budaya yang melekat pada komunitas tersebut (Sudibya, 2018). Kelompok sadar wisata (Pokdarwis) merupakan kelembagaan pada tingkat masyarakat yang anggotanya tersusun atas para pelaku kepariwisataan. Pokdarwis berperan dalam mendukung tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar yang meliputi: (1) meningkatkan pemahaman kepariwisataan; (2) meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan; (3) meningkatkan nilai manfaat kepariwisataan bagi masyarakat;

dan (4) menyukseskan pembangunan kepariwisataan di daerah setempat (Rohmat, 2021).

2.5 Pariwisata Berbasis Masyarakat/ *Community Based Tourism* (CBT)

Pariwisata berbasis masyarakat didefinisikan sebagai pariwisata yang memperhatikan kelestarian lingkungan, sosial, dan budaya. Dikelola dan dimiliki oleh dan untuk masyarakat dengan tujuan agar pengunjung dapat meningkatkan kesadaran dan belajar tentang masyarakat dan cara hidup lokal (*Responsible Ecological Social Tour*, 1997). Pariwisata berbasis masyarakat/*Community Based Tourism* (CBT) bertujuan untuk menciptakan industri pariwisata lebih berkelanjutan yang berfokus pada masyarakat setempat dalam hal perencanaan dan mempertahankan pembangunan pariwisata. Jika strategi pariwisata mengacu pada berkelanjutan maka pengembangan dan pemberdayaan masyarakat harus dikembangkan sebagai tujuan utama (Sulistiyadi & Derinta Entas, 2019).

Pariwisata berbasis masyarakat merupakan konsep pariwisata dimana pengembangan masyarakat merupakan poin penting dalam konsep ini agar masyarakat secara kolektif mampu mandiri mengelola potensi pariwisata di kawasannya (N et al., 2015). Menurut Pasanchay & Schott (2021) pariwisata berbasis masyarakat adalah pendekatan pariwisata yang dinilai mampu mencapai kemajuan pada tujuan berkelanjutan 1 (SDG 1) tanpa kemiskinan dan tujuan berkelanjutan 11 (SDG 11) keberlanjutan kota dan komunitas.

Berdasarkan *Caribbean Tourism Organization* (2019), terdapat beberapa potensi manfaat *Community Based Tourism* (CBT) bagi masyarakat, diantaranya: (1) memberikan dampak ekonomi yang positif (pendapatan), (2) menghasilkan keuntungan tambahan bagi masyarakat, (3) menciptakan peluang bisnis di masyarakat, (4) meningkatkan identitas masyarakat, rasa bangga dan persatuan, (5) mendorong keindahan masyarakat, (6) mendukung pelestarian, perayaan budaya dan warisan lokal, (7) membuka pasar baru untuk produk buatan masyarakat, (8) mempromosikan lebih banyak keterlibatan dan peluang bagi perempuan dan pemuda untuk membantu mengurangi ketimpangan, (9) meningkatkan pilihan mata pencaharian, menciptakan aliran pendapatan baru, dan memberikan hal yang baru

terkait pandangan tentang kehidupan masa depan bagi anggota masyarakat, (10) melindungi aset masyarakat untuk mempertahankan pendapatan bisnis dari waktu ke waktu, (11) diversifikasi penawaran produk pariwisata untuk meningkatkan daya saing global, dan (12) menarik dukungan dari pemerintah dan pembangunan organisasi regional di daerah tertinggal.

Pariwisata berbasis masyarakat mempunyai banyak potensi manfaat namun demikian juga memiliki sejumlah potensi risiko, yaitu: (1) budaya lokal dapat berubah karena adanya pengaruh budaya dan tradisi wisatawan, (2) budaya masyarakat dapat digunakan dengan cara yang tidak tepat, (3) lingkungan dan sumber daya alam dapat rusak, (4) kegagalan bisnis karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan bisnis pariwisata, (5) biaya hidup dan inflasi yang lebih tinggi dari harga properti, (6) meningkatnya persaingan untuk penggunaan sumber daya, (7) meningkatnya kejahatan, (8) munculnya persaingan dalam komunitas, (8) perpecahan dalam komunitas, dan (9) masalah sosial.

Giampiccoli et al (2020) menyatakan bahwa berdasarkan berbagai definisi dan prinsip-prinsip dasar dalam pariwisata berbasis masyarakat, teori yang dikembangkan oleh Suansri (2003) memberikan indikasi adanya istilah keberlanjutan dan lingkungan. Prinsip dalam pembangunan berkelanjutan diimplementasikan pada pariwisata berbasis masyarakat agar dapat mencapai keberlanjutan. Terdapat lima dimensi dalam Pariwisata Berbasis Masyarakat/*Community Based Tourism* yang meliputi dimensi ekonomi, dimensi sosial, dimensi budaya, dimensi lingkungan dan dimensi politik.

2.5.1 Dimensi Ekonomi

Indikator keberlanjutan pariwisata berbasis masyarakat pada dimensi ekonomi meliputi: tersedianya anggaran untuk pengembangan komunitas masyarakat, terciptanya peluang lapangan pekerjaan di sektor pariwisata dan peningkatan pendapatan masyarakat lokal (Suansri, 2003). Pengembangan pariwisata yang didasarkan pada pendekatan pariwisata berbasis masyarakat/*Community Based Tourism* memberikan dampak pada peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat setempat (Kunasekaran et al., 2017), dapat menyediakan kesempatan/peluang kerja

terkait pariwisata (Lee & Jan, 2019; Sukmawati dkk., 2019; Mahanani & Listyorini, 2021); masyarakat setempat dapat memperoleh pendapatan dari pariwisata (Alfatianda & Djuwendah, 2017, Lee & Jan, 2019; Sukmawati dkk., 2019; Mahanani & Listyorini, 2021), mendorong pertumbuhan dan perputaran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Strydom et al., 2019) dan peningkatan kemampuan kewirausahaan yang dinilai mampu untuk menurunkan kemiskinan (Putra & I, 2021).

Menurut Carribean Tourism Organization (2019) pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dapat membantu masyarakat setempat menjadi lebih berkelanjutan secara ekonomi melalui sumber pendapatan ekonomi lain, membantu mendiversifikasi ekonomi lokal dan menciptakan modal di masyarakat. Selain itu, pariwisata berbasis masyarakat menciptakan pilihan pekerjaan tambahan dan menghasilkan pendapatan sekunder melalui pengeluaran wisatawan, penggunaan dan perdagangan produk lokal. Dalam menerapkan pariwisata berbasis masyarakat, seringkali masyarakat setempat kekurangan sumber daya keuangan, pengetahuan pariwisata, keterampilan bisnis, dan kapasitas, untuk itu diperlukan stimulasi eksternal berupa pelatihan baik dari pemerintah maupun swasta. Isu lebih lanjut adalah kelayakan ekonomi dan keberlanjutan pariwisata berbasis masyarakat untuk memastikan efek positif jangka panjang dan pemberdayaan masyarakat setempat.

2.5.2 Dimensi Sosial

Indikator keberlanjutan pariwisata berbasis masyarakat pada dimensi sosial meliputi: terdapatnya peningkatan kualitas hidup, adanya peningkatan kebanggaan komunitas, pembagian peran yang adil dan merata serta terdapatnya mekanisme penguatan organisasi komunitas (Suansri, 2003). Pada dimensi sosial pengembangan pariwisata berbasis masyarakat seharusnya dapat meningkatkan taraf hidup dan kualitas hidup masyarakat setempat (Strydom et al., 2019), meningkatkan kesejahteraan sosial, menonjolkan nilai-nilai sosial masyarakat setempat, dan meningkatkan kebanggaan lokal (López et al., 2018). Peningkatan kesadaran masyarakat mampu memperkuat hubungan dan kepercayaan antar masyarakat sehingga dapat meningkatkan kolaborasi dan kerja sama dalam

masyarakat (Lindstrom & Larson, 2016). Selain itu secara sosial juga berdampak pada pengakuan kawasan sebagai tujuan wisata (Aghazamani & Hunt, 2017).

Penerapan pariwisata berbasis masyarakat dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap struktur sosial masyarakat. Dengan meningkatkan kebanggaan, harga diri, dan rasa memiliki pada masyarakat lokal dapat menumbuhkan hubungan sosial di masyarakat secara keseluruhan. Pendidikan yang terkait dengan pariwisata dapat membantu meningkatkan pengetahuan umum, komunikasi, dan keterampilan khusus. Hubungan dengan pengunjung dapat lebih meningkatkan tingkat kepercayaan, memungkinkan peningkatan posisi secara keseluruhan di tingkat regional atau nasional (*Caribbean Tourism Organization*, 2019). Selain itu pariwisata berbasis masyarakat dibangun di atas gagasan partisipasi masyarakat dari tingkat pengembangan, implementasi, dan manajemen. Hal tersebut memberikan kesempatan bagi masyarakat lokal untuk mengontrol dan memiliki pengaruh aktif pada pengembangan dan pengelolaan pariwisata. Dalam berpartisipasi, anggota masyarakat memerlukan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang memadai (Giampiccoli & Saayman, 2018).

2.5.3 Dimensi Budaya

Indikator keberlanjutan pariwisata berbasis masyarakat pada dimensi budaya meliputi: faktor pendorong masyarakat untuk menghormati budaya yang berbeda, pendorong berkembangnya pertukaran budaya dan adanya budaya pembangunan yang melekat erat dalam budaya lokal (Suansri, 2003). Pada dimensi budaya interaksi masyarakat setempat dengan wisatawan menyebabkan pertukaran informasi (Rohani, 2021) sehingga mempengaruhi sikap dan toleransi masyarakat terhadap wisatawan (Budiarsa, 2018). Selain itu pariwisata berbasis masyarakat dinilai mampu mendorong pelestarian adat istiadat dan nilai budaya (Aghazamani & Hunt, 2017), pelestarian budaya lokal untuk diwariskan kepada generasi penerus (Sukmawati dkk., 2019; Rohani, 2021; Putra & I, 2021) dan meningkatkan pusat budaya (Aghazamani & Hunt, 2017).

Menurut *Caribbean Tourism Organization* (2019) pengembangan dan implementasi pariwisata berbasis masyarakat juga berdampak pada budaya masyarakat. Pertukaran lintas budaya dengan wisatawan dapat menyebabkan

perubahan positif dalam kebanggaan terhadap warisan dan budaya lokal. Perayaan praktik tradisional, seperti pertanian, perikanan, kerajinan tangan, dan seni pertunjukan, dapat merevitalisasi dan melestarikan warisan. Retensi mata pencaharian tradisional ini merupakan alat untuk menciptakan produk pariwisata baru, misalnya, praktik seperti perikanan atau pertanian. Selain itu, manfaat ekonomi membantu melindungi dan melestarikan budaya lokal. Melalui pariwisata berbasis masyarakat, kesempatan pendidikan membantu meningkatkan kesadaran budaya pada turis dan penduduk lokal serta menanamkan rasa kebanggaan dalam masyarakat. Sebaliknya, pengaruh wisatawan dapat menimbulkan modifikasi budaya dan akulturasi.

2.5.4 Dimensi Lingkungan

Indikator keberlanjutan pariwisata berbasis masyarakat pada dimensi lingkungan meliputi: pengetahuan daya dukung lingkungan, terdapat sistem pembuangan/pengelolaan sampah/limbah yang ramah lingkungan dan adanya peningkatan kepedulian tentang pentingnya konservasi (Suansri, 2003). Pada dimensi lingkungan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dapat meningkatkan kesadaran penduduk setempat terhadap lingkungan (Lee & Jan, 2019; Sukmawati dkk., 2019; Putra & I, 2021), terjaganya kawasan konservasi, terjaganya sumber-sumber air, dan kesadaran masyarakat dalam pengelola sampah (Putra & I, 2021). Menurut Lee et al (2021) dilakukannya pengelolaan terhadap limbah padat yang dihasilkan merupakan indikator keberlanjutan yang penting dalam dimensi pengelolaan lingkungan.

Pariwisata berbasis masyarakat dapat membantu masyarakat setempat melindungi dan melestarikan lingkungan alam dan buatan mereka. Selain itu, dapat membatasi efek negatif pariwisata pada sumber daya lingkungan jika diterapkan dengan benar dan sistematis. Lingkungan alam masyarakat seringkali menentukan daya tarik suatu destinasi pariwisata. Mendidik masyarakat lokal tentang manfaat melestarikan sumber daya alam mereka untuk dijadikan daya tarik wisata dan keunikan alam dapat meningkatkan kesadaran dan kebanggaan untuk melakukannya. Meningkatkan sikap terhadap perlindungan dapat membantu

mengurangi ancaman lokal terhadap lingkungan alam, seperti diantaranya pertanian ekstensif.

Pariwisata berbasis masyarakat dapat mengarah pada penerapan teknologi dan teknik baru untuk mengurangi konsumsi air dan energi. Standar dan kebijakan lingkungan selanjutnya dapat membantu melestarikan dan melindungi lingkungan dengan mendaur ulang kaca, kertas, plastik, serta pemantauan dan pengelolaan lingkungan (Nair & Hamzah, 2020). Pariwisata dapat menambah tekanan pada lingkungan dan sumber daya dengan meningkatkan konsumsi air dan energi. Selanjutnya, penambahan sampah (plastik, makanan, dan kotoran manusia) dan peningkatan emisi akibat kegiatan transportasi dan pariwisata meningkatkan dampak negatif. Kerusakan keanekaragaman hayati lokal juga dapat terjadi, karena area baru dibuat dapat diakses oleh wisatawan (*World Tourism Organization*, 2020).

2.5.5 Dimensi Politik

Indikator keberlanjutan pariwisata berbasis masyarakat pada dimensi politik meliputi: terdapat upaya peningkatan partisipasi dari penduduk lokal, terdapat upaya untuk meningkatkan kekuasaan komunitas yang lebih luas dan terdapat mekanisme yang menjamin hak-hak masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam (Suansri, 2003). Pada dimensi politik pariwisata berbasis masyarakat akan semakin berkualitas apabila semakin banyak masyarakat lokal yang berpartisipasi dalam komunitas. Hal tersebut karena masyarakat setempat akan merasa bertanggung jawab untuk ikut serta dalam menjaga keberlanjutan destinasi wisata (Wibawa & Budiasa, 2018). Partisipasi aktif masyarakat dalam suatu kegiatan dapat diawali dengan tingkat atau frekuensi kehadiran dalam setiap kegiatan yang terkait dengan pengembangan wisata, baik dalam bentuk formal maupun informal (Rachmawati, 2022). Strydom et al (2019) menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat memberi mereka kekuatan untuk membuat keputusan tentang isu-isu yang melibatkan aset mereka termasuk sumber daya komunal.

Menurut Knight & Cottrell (2016) partisipasi aktif masyarakat dalam suatu kegiatan pembangunan pariwisata ditentukan oleh keberadaan aturan main

termasuk diantaranya kebijakan, peraturan, nilai/norma maupun kebiasaan yang mengatur masyarakat dalam kesehariannya. Peraturan yang baik dan mendukung partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk dapat memastikan adanya kesempatan yang sama bagi semua anggota masyarakat agar mereka dapat mengakses sumber daya, baik itu dalam bentuk fisik maupun non-fisik yang sangat penting bagi pemberdayaan masyarakat.

Menurut *World Tourism Organization* (2020) pariwisata berbasis masyarakat merupakan bentuk memberdayakan masyarakat, terutama masyarakat adat atau pedesaan. Pada tingkat politik masyarakat memiliki kesempatan untuk didengar dan diakui, serta mengarah pada pelimpahan wewenang. Pengambilan keputusan lokal memastikan hak untuk mengelola sumber daya alam dan perencanaan pariwisata. Oleh karena masyarakat paling dekat dengan sumber daya maka mereka di nilai sangat cocok untuk memantau dampak negatif pariwisata jika diberi wewenang untuk melakukannya. Berdasarkan hal tersebut maka perlu menetapkan standar tata kelola yang efisien dan transparan dalam membantu masyarakat untuk diakui secara sah oleh pihak berwenang, tidak hanya mengenai pariwisata tetapi juga di bidang kehidupan masyarakat lainnya. Kewenangan masyarakat lokal dalam mengelola sumber daya dapat membantu mencegah kemitraan swasta-publik atau asing yang tidak setara, untuk itu diperlukan tata kelola yang diterapkan dengan baik untuk menjadikan pariwisata sebagai alat untuk pengembangan masyarakat. Kurangnya tata kelola dan kepemilikan tanah dianggap sebagai penghalang pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (Dodds et al., 2018).

SEMARANG
SEKOLAH PASCASARJANA